

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MENINGKATKAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DESA BATURAJA KECAMATAN
WAYLIMA KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

Muna Khairunnisa.M

NPP. 30.0471

Asdaf Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung

Program Studi Keuangan Publik

Email: munakhairunnisaa20@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Tun Huseno, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Reporting in village finances is used as a form of accountability for village financial management, the village government has not been able to make a financial report correctly in accordance with regulations and on time. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the implementation of village financial management in the Baturaja village accountability report. **Method:** This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. The focus of the research is to describe the implementation of village financial management and also to describe how the Pesawaran District Government's efforts to improve the village's financial accountability report. **Result:** The research results obtained by the author are that Baturaja Village has implemented village financial management quite well in Baturaja village, through the efforts provided by the Regional Government of Pesawaran Regency by applying government programs in terms of village financial management, namely implementing the Siskeudes Application in managing village finances so that it helps village apparatus in managing village finances and improving village financial accountability reports. **Conclusion:** Village financial management in Baturaja village has been well implemented, this is because the Regional Government of Pesawaran Regency and Baturaja Village officials have applied government programs in terms of village financial management through the Siskeudes Application to help implement village financial management in improving village financial accountability reports.

Keywords: *Implementation, Application of the Village Financial, Quality of Financial Reports.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelaporan dalam keuangan desa dijadikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa belum dapat membuat suatu laporan keuangan secara benar sesuai dengan peraturan dan tepat pada waktunya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan desa dalam laporan pertanggungjawaban desa baturaja. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang menjadi fokus penelitian ialah mendeskripsikan implementasi pengelolaan keuangan desa dan mendeskripsikan juga bagaimana usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran untuk meningkatkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa tersebut. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang diperoleh

penulis ialah bahwa Desa Baturaja telah mengimplementasikan pengelolaan keuangan desa dengan cukup baik di desa Baturaja, melalui upaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dengan cara mengaplikasikan program pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan desa yaitu mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa sehingga membantu perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa serta meningkatkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. **Kesimpulan:** Pengelolaan keuangan desa di desa baturaja telah terimplementasikan dengan baik, hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran serta para aparat Desa Baturaja yang telah mengaplikasikan program pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan desa melalui Aplikasi Siskeudes guna membantu implementasi pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. **Kata kunci:** Implementasi, Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kualitas Laporan Keuangan.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah mulai terarah dan fokus pada desa sebagai dasar pada penguatan pembangunan bangsa, karena jika desa sejahtera maka Negara juga tentu akan kuat. Untuk membantu desa dalam menjalankan semua kegiatan pemerintahan dan pembangunannya, maka pemerintah memutuskan untuk memberikan anggaran kepada desa berupa keuangan desa yang seharusnya ini dialokasikan pemerintah daerah untuk desa.

Pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa dijadikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban desa yang digunakan oleh desa agar terciptanya bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pada desa-desa. Dana itu dibagikan ke tiap desa di seluruh Indonesia dengan rumus bagi 80% dibagi secara merata ke seluruh desa, selanjutnya 20% sisa diperuntukkan sebagai tambahan secara proporsional bagi desa yang berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dan wilayah, kemudian tiga persen dialokasikan sebagai tambahan pada desa yang berstatus tertinggal.

Alokasi Dana Desa (ADD) ataupun termasuk juga Dana Desa (DD) tentunya harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desanya melalui Laporan pertanggungjawaban, selanjutnya sebagai salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan desa. Pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa terkait penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 27, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN pasal 24 dan juga bersumber dari Permendagri Nomor 113 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan.

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa ini pada umumnya dilakukan secara manual yang tentunya akan memiliki banyak kekurangan dan mengakibatkan keterlambatan pemerintah desa dalam proses membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikelola oleh desa yang pastinya akan berdampak pada siklus anggaran di desa yang bersangkutan. Permasalahannya adalah bahwa Pemerintah Desa belum dapat membuat suatu laporan keuangan secara benar dan tepat waktu. Desa Baturaja Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran yang dipilih peneliti untuk menjadi objek penelitian ini merupakan desa yang ternyata memiliki Dana Alokasi Desa yang cukup besar, dimana dana itu diperlukannya pengelolaan keuangan harusnya dilakukan dengan baik dan juga diharapkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan yaitu transparan, akuntabel, serta partisipatif selanjutnya pengelolaan keuangan desa tersebut dilakukan dengan harapan agar menjadi tertib serta disiplin anggaran. Dapat diketahui juga, bahwa dalam

pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Baturaja Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran dalam input data penggunaan anggaran belum dilakukan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang diceritakan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dan juga memutuskan untuk mengambil judul penelitian **“Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Baturaja Kecamatan Waylima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung”**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa adalah masih relatif rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparat desa dalam sehingga menjadi tugas yang tentu cukup besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran untuk memampukan perangkat-perangkat desanya dalam memahami dan mengimplementasikan pengelolaan keuangan desa dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Permasalahan lainnya yang menjadi penghambat pengelolaan keuangan desa adalah masih adanya keterlambatan aparat desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa, hal ini sangat amat disayangkan mengingat laporan pertanggungjawaban memiliki batas atau tenggat waktu laporan itu harus diserahkan kepada pimpinan. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) ini ternyata masih sangat terbatas merupakan salah satu masalah dan kendala yang membuat desa belum meratanya kemampuan mengadopsi teknologi di setiap unit pada pemerintahan desa. Berbagai permasalahan diataslah yang menyebabkan bahwa belum semuanya desa yang ada dalam Kabupaten Pesawaran bisa menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dengan konteks yang sama yaitu pengelolaan keuangan desa. Peneliti Astuti dan Yulianto mengemukakan perlu adanya tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan desa. Good Governance diajukan demi tercapainya pengelolaan manajemen yang lebih transparan bagi semua penggunaan laporan keuangan (Astuti dan Yulianto, 2016). Penelitian Lina dan Nur Anisa berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang (Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa, 2017), mengemukakan pengelolaan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa. Penelitian Arif Rivan dan Irfan Ridwan Maksun mengemukakan bahwa Penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya siskeudes ini diharapkan desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat desa (Arif Rivan dan Irfan Ridwan Maksun, 2019). Penelitian Fitri dan alfi mengemukakan bahwa bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2% (Fitri dan Alfi, 2019). Penelitian Risyah, Umami and Nurodin, Idang (2017) dalam *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa* selanjutnya mengemukakan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya,

diantaranya prinsip tersebut dilaksanakan dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat setiap pencairan dana dari pendapatan transfer, pemasangan baliho tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas terkait pengelolaan keuangan desa yang menjadi acuan ketertarikan penulis untuk membahas topik penulis di atas. Dari penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama seperti judul penelitian penulis.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan peneliti lebih terfokus kepada implementasi pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan laporan pertanggungjawaban desa, metodenya yang digunakan menggunakan mix methods juga berbeda dengan penelitian sebelumnya dimana peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang memiliki beberapa dimensi dan beberapa indikator yang mendukung kegiatan penelitian.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengimplementasian pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan laporan pertanggungjawaban di Desa Baturaja

II. METODE

Metode di dalam penelitian penulis menggunakan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode tersebut sesuai dengan permasalahan yang berada di lingkup kondisi sosial yang kompleks dan dinamis seperti pada fokus penelitian yang mengarah pada pengelolaan keuangan desa. Dijelaskan pendekatan kualitatif ialah suatu pendekatan yang dilakukan secara sistematis terhadap tujuan penelitian agar terdapatnya suatu hasil dimana peneliti menjadi perangkat kunci dalam penelitian, selanjutnya hasil tersebut dijelaskan dengan kalimat tertulis pada data empiris yang telah didapat dan pendekatan juga menyudutkan makna daripada generalisasi. Dengan penjelasan diatas peneliti memandang bahwa penelitian kualitatif sangat cocok digunakan dalam penelitian yang peneliti lakukan, sebab penelitian ini sangat memungkinkan untuk peneliti mengkaji pada fokus persoalan yang akan penulis melakukan penelitian secara mendalam dan mengkaji lebih luas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam wujud data primer dan data sekunder. Sumber data primer, yaitu data yang langsung diperoleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi. Sumber data sekunder, merupakan data yang langsung diperoleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Bisa juga dikatakan data yang tersistematis dalam bentuk dokumen-dokumen. Pada sumber data sekunder ini, peneliti memperoleh data dari internet dan jurnal

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teori Implementasi George C. Edward III menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan dengan menggunakan dimensi-dimensi serta indikator- indikator yang relevan dengan fenomena yang terjadi di lapangan dalam hal ini dapat dirumuskan terhadap apa yang

peneliti sudah teliti di tempat penelitian yang sebelumnya sudah dijadwalkan yaitu di Desa Baturaja, sebagai berikut:

3.1 Komunikasi

Baturaja merupakan desa yang terbelang cukup lambat dalam proses pengelolaan keuangan desa sebab dalam pengelolaannya masih dilakukan secara manual. Pemerintah desa baturaja mendapat informasi mengenai aplikasi yang dipergunakan untuk memudahkan dalam proses pengelolaan keuangan desa yaitu APLIKASI SISKUDES (Sistem Keuangan Desa) yang mulai diperkenalkan di Desa Baturaja pada tahun 2019 dan mulai di implementasikan pada tahun 2020

a. Transmisi

komunikasi dilihat juga melalui transmisi atau penghubung komunikasi di Desa Baturaja belum seluruhnya berjalan dengan baik karena masih adanya kesalahpahaman akan informasi atau perintah yang diberikan dalam hal perangkat desa tidak merespon dengan baik sehingga proses komunikasi mengalami miskomunikasi. Terjadinya miskomunikasi tersebut berdampak pada Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Laporan Pertanggungjawaban di Desa Baturaja

b. Kejelasan Komunikasi

bahwa terkadang informasi yang disampaikan atasan lewat perintah kerja tidak jelas hal ini berarti bahwa *informan* dalam hal ini adalah pimpinan memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan kejelasan perintah yang diberikan

c. Konsistensi Pelaksanaan

terjadinya ketidak-konsistensi lewat perintah-perintah yang kini dikeluarkan akan berpengaruh besar terhadap ketidakefektifan implementasi pengelolaan keuangan desa dalam laporan pertanggungjawaban

3.2 Sumber Daya

Sumber Daya merupakan faktor penting dalam melakukan dalam melaksanakan suatu kebijakan. Sumber daya menurut Edward (Agustino, 2019) diantaranya adalah : “Staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas”. Oleh sebab itu, sumber-sumber ini harus dikelola secara baik untuk dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi pada organisasi pemerintahan sehingga menciptakan pegawai yang berkompeten dalam menjalankan pekerjaan.

a. Staff

selain melalui Pelatihan, perangkat desa dapat mempelajari tentang Siskeudes secara mandiri melalui Pedoman Penggunaan Siskeudes dan video tutorial yang diberikan BPKP. Hal ini tentunya juga sangat amat membantu dalam mempercepat pemahaman pada perangkat desa mengenai Siskeudes dan menjadi faktor pendorong dan pendukung dalam mengimplementasikan Siskeudes di seluruh desa yang ada di Kabupaten Pesawaran.

b. Informasi

bahwa informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Para pelaksana kebijakan tentu harus diberi pemahaman secara keseluruhan untuk dapat menerapkan Aplikasi (SISKEUDES) secara professional.

c. Wewenang

Kewenangan dalam proses pengambilan kebijakan merupakan hal yang sangat mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan. Dengan kewenangan yang dimiliki maka perintah atau arahan dapat juga mempermudah seluruh dan segala proses pengelolaan keuangan desa agar membuat laporan

pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan pada akhirnya sudah sesuai dengan ketentuan

d. Fasilitas

fasilitas yang ada sudah cukup memadai bila digunakan untuk menjalankan aplikasi Siskeudes, namun masih terhambat karena jaringan internet.

3.3 Disposisi

Baturaja memiliki aparat masing-masing dalam pelaksanaannya dan saling membangun komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pemerintah Desanya ini memiliki perangkat desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, para Kepala Urusan dan aparat lainnya serta diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa dan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah desa

a. Pengangkatan birokrasi

Rekrutmen birokrasi yaitu salah satu bentuk dari tata usaha pegawai dimana hal ini sangat penting untuk mewujudkan pegawai yang mempunyai kemampuan serta dapat bekerja dengan efektif, efisien dan profesional. Desa Baturaja memiliki operator tersendiri untuk mengoperasikan Siskeudes.

b. Insentif

Tambahan penghasilan atas suatu pekerjaan lain dan juga tertentu diluar dari gaji pokok suatu pegawai (insentif) tertentu, dapat menjadi poin utama yang membuat para pekerja melakukan pekerjaannya dengan baik

3.4 Struktur Birokrasi

Edward (dalam Agustino 2019) mengatakan bahwa Birokrasi adalah salah satu bidang yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pusat utama dalam kebijakan. Birokrasi tidak hanya tertumpu pada struktur pemerintahan tetapi juga bisa terdapat pada sektor swasta, bahkan instansi pendidikan dan bisa juga pada suatu sistem birokrasi yang dilahirkan guna menjalankan suatu kebijakan tertentu.

a. Fragmentasi

Penghalang atau kendala dalam fragmentasi yang terdapat pada birokrasi adalah usaha untuk menghalangi kerjasama antara kepala badan dan bidang-bidangnya disebabkan oleh perumpamaan prioritas dari pihak eksternal yang memaksa para birokrat yang berada di Desa untuk menggagalkan kerjasama antara pihak eksternal semestinya dalam menjalankan suatu wewenang dibutuhkan sumber-sumber untuk melakukan kebijakan yang kompleks haruslah berkerjasama.

b. Standar Operasional Prosedur

Peraturan Hukum dan SOP tentang Siskeudes adalah salah satu perangkat penting untuk dapat juga menerapkan Siskeudes yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam penerapan Siskeudes, pemberian hadiah bagi desa-desa yang telah secara tetap menerapkan Siskeudas secara baik dan dasar pemeberian hukuman apabila terdapat desa yang tidak menerapkan Siskeudes

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dengan adanya Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Meningkatkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Baturaja memberikan dampak positif bagi Desa Baturaja dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam rangka memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran tentang bagaimana cara pengelolaan

keuangan desa yang baik dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berguna untuk meningkatkan laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Temuan yang penulis dapatkan yaitu masih rendahnya partisipasi para perangkat desa untuk mengaplikasikan program pemerintah yaitu Aplikasi Siskeudes tersebut yang dikarenakan faktor sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan juga pendamping bagi perangkat desa. Program sosialisasi mitigasi ini diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat dari usia muda sampai tua. Sama halnya dengan temuan Arif Rivani dan Irfan Ridwan Maksud mengemukakan bahwa Penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) membantu proses pengelolaan keuangan desa jadi lebih baik dan sesuai dengan peraturan perundangan. (Arif Rivani dan Irfan Ridwan, 2019)

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan laporan pertanggungjawaban desa yaitu tingkat kesadaran perangkat desa dan masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi masih rendah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis terkait Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Baturaja yang dilakukan pada tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan 21 Februari 2023 maka peneliti menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi Desa Baturaja sudah cukup efektif dikarenakan terkait pengimplementasian Aplikasi Siskeudes yang membantu proses pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pesawaran, namun masih ada beberapa hambatan dan kendala yang masih harus terus diperbaiki guna menciptakan pengelolaan keuangan desa yang baik dan meningkatkan laporan pertanggungjawaban desa sesuai dengan peraturan perundangan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu desa saja sebagai model studi kasus yang dipilih yaitu di Desa Baturaja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Laporan Pertanggungjawaban Desa Baturaja.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Baturaja beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian serta memperoleh informasi dan data guna menyelesaikan penelitian, selanjutnya disampaikan terima kasih kepada teruntuk seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Produser Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Agustino. 2019. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Rineka Cipta

Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta:

Ghalia Indonesia

Fathoni. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik. Penyusunan Skripsi.*

Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Harsono, 2011. *Etnografi Pendidikan sebagai Desain Penelitian Kualitatif.*

Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Ikbar, Yanuar. 2012. *Metodelogi Penelitian.* Bandung: Alfabeta.

Jogiyanto. 2005. *Sistem Informasi Strategi.* Yogyakarta: Andi Offset

Kantaprawira Rusadi. 1992. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar.*
Bandung: Sinar

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

